

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 6  
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 83 TAHUN 2011 TENTANG TATA  
CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN  
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
(Studi di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**TIARA VIRGINIA JASMINE  
NPM:1521020174**

**Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2020M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 6  
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 83 TAHUN 2011 TENTANG TATA  
CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN  
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
(Studi di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Bandar Lampung)**

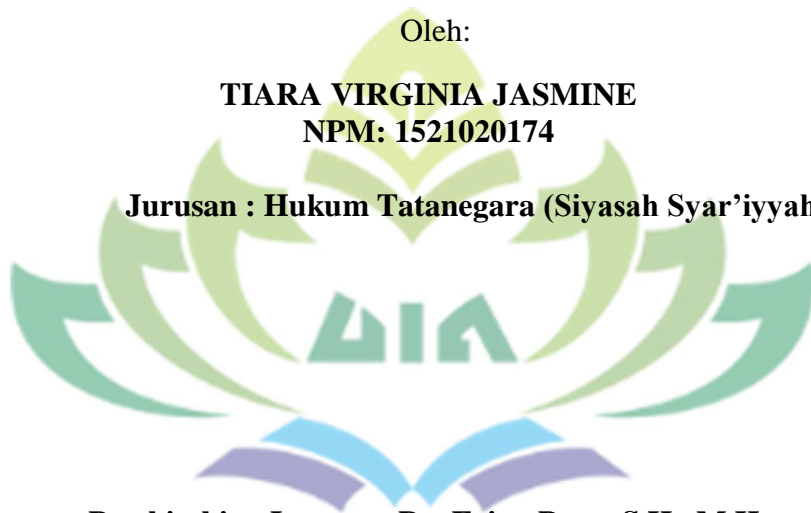
**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**TIARA VIRGINIA JASMINE  
NPM: 1521020174**

**Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**



**Pembimbing I : Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.**

**Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441H/2020M**

## ABSTRAK

Parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti ditempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan oleh rambu-rambu lalu lintas atau tidak oleh pengemudinya tentunya ada seseorang yang bekerja sebagai keamanan dan bertanggung jawab dalam menjaga kendaraan tersebut. Ada larangan parkir ditepi badan jalan karena akan mempersempit ruang kendaraan yang melintas. Ditinjau dari peraturan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 83 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa tarif parkir kendaraan roda dua sebesar Rp 1500 pada satu jam pertama, setelah satu jam pertama dikenakan retribusi Rp 1000 per jamnya sedangkan untuk tarif parkir kendaraan roda empat sebesar Rp 2500 pada satu jam pertama, setelah lewat dari satu jam pertama dikenakan retribusi Rp 1500 perjamnya. Hukum Islam menjelaskan bahwa hukum pajak dan pemungutannya apabila menyalahi aturan yang telah ditentukan dari suatu pemimpin maka hal tersebut jelas keharamannya, hal ini sesuai dengan surah Ali-Imran ayat 76 mengenai penetapan peraturan yang harus dijalankan sesuai peraturan yang berlaku. Sangat jelas bagi orang yang menyalahi aturan dalam tindakan pengambilan atau yang melakukan penarikan dalam retribusi secara batil itu diharamkan oleh Islam. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan bagaimana implementasi Peraturan Walikota Pasal 6 Nomor 83 Tahun 2011 tentang tarif parkir kendaraan di jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi tarif parkir kendaraan dalam Peraturan Walikota Pasal 6 Nomor 83 tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Pasal 6 Nomor 83 tahun 2011 melihat terjalankannya Peraturan Walikota Pasal 6 Nomor 83 tahun 2011 serta melihat tinjauan fiqh siyasah dari implementasi Peraturan Walikota Nomor 83 tahun 2011. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengambil data yang berupa tulisan, perilaku, tindakan, peristiwa, kejadian, dan kata-kata penulis menggunakan metode induktif untuk menganalisis data dengan bentuk laporan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implemetasi Peraturan Walikota Nomor 83 tahun 2011 masih kurang baik dimana dalam pengelolaan parkir di lapangan dapat dilihat masih adanya parkir ganda . Jika dikaitkan dengan fiqh siyasah dalam prinsip persamaan hak dalam mewujudkannya dapat dilihat dari nilai keadilan sebagaimana apabila hukum itu berdiri supaya diterapkan dengan adil.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Bandar Lampung)**

**Nama Mahasiswa** : **Tiara Virginia Jasmine**

**NPM** : **1521020174**

**Jurusan** : **Siyasah Syar'iyah**

**Fakultas** : **Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosayah dan dipertahankan dalam siding Munaqosyah**

**Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197005022000032001**

**Pembimbing II**

**Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197408162003122004**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Siyasah**

**Frenki M.Si.**  
**NIP. 197111061998032005**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Bandar Lampung)”, disusun oleh: Tiara Virginia Jasmine, NPM: 1521020174, program studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: 2020.

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua Sidang : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.**

**Sekretaris : M. Irfan, M. Sy**

**Penguji I : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M**

**Penguji II : Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum**

**Penguji III : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H**

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H**  
**NIP. 196210219930310002**



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

(Q.S An-Nisaa 29)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbilalamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ayahku Isya Ansori, terimakasih atas support, nasehat, dukungan setiap harinya.
2. Ibu tersayangku, Miswati, terimakasih atas nasehat dan semangat yang tak henti-hentinya dan tak bosan-bosan ibu berikan kepada penulis untuk mencapai kesuksesan. Terimakasih telah mengandung, melahirkan, dan merawatku hingga menjadi seperti ini. Karya sederhana ini yang penulis persembahkan tidak sejujung kuku pun dapat membalas perjuangan kalian tetapi penulis berharap karya ini akan sedikit memberikan rasa bangga dan senyum kebahagiaan di wajah yang sudah mulai menua dan sedikit membayar lelah dan letih atas perjuangan kalian.
3. Adikku tercinta, Cindy Amalia Izzati, Alfian Jauhari, terimakasih atas semangat, dukungan serta doa kalian kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya kepadamu.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

## **RIWAYAT HIDUP**

**Tiara Virginia Jasmine**, lahir pada tanggal 04 Mei 1997 di Desa Tanjung Harapan, Kabupaten Lampung Tengah. Anak Pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Isya Ansori dan Ibu Miswati. Beralamat di 29 Metro utara,.

1. Penulis mulai menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Totokaton Bulan pada tahun 2003.
2. Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 9 Metro Barat pada tahun 2009.
3. Pendidikan menengah atas ditempuh penulis di MAN 1 Metro pada tahun 2012. Selama penulis menempuh pendidikan penulis aktif dibidang ekstrakurikuler Radio Man 1 Metro, Drumb band.
4. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah jurusan Siyasa.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 83 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (Studi di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Bandar Lampung)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaalloh mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Ibu Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada segenap keluarga civitas akademika, dosen, dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Siyasah Angkatan 2015, khusus Siyasah E: Ria Dwi Afrida, Fitriani, Elisa Septiona, Mayang, Anggraini, Fitriani, Rima Sinfalina, Yunnita, S.H, Repi Susanti, S.H, Elisa, Nadiyah, Ice, Habib, Ovi, Jodi, Andre, Billi, Yedi, Khomsi Juniardi, S.H, Zaenuri, Adha, A. Windo Adenensi, S.H, Samsuddin, Qodar, Bambang, Ari, Fauzi yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai terselesainya skripsi.
9. Teman seperjuangan dari SMP,MAN sampai kuliah Ani Lupita Sari, Maya Rizki Safitri, Rohmatul Ummah, Nurul Zakiana Ms yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi.
10. Teman-teman Laskar Pelangi
11. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.



Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 2020

Tiara Virginia Jasmine  
NPM.1521020174



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul ..	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah .....	5
D. Fokus Penelitian .....	11
E. Rumusan Masalah.....	11
F. Tujuan Penelitian .	12
G. Signifikasi Penelitian .....	12
H. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Fiqh Siyasah	
1. Pengertian Fiqh Siyasah .....	19
2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah.....	27
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	30
4. Tujuan Fiqh Siyasah.....	34
B. Konsep Retribusi	
1. Pengertian Retribusi .....	36
2. Jenis Retribusi .....	39
3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Parkir .....	42
4. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi .....	42
5. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluarsa .....	46
C. Konsep Implementasi .....	47
D . Tinjauan Pustaka .	50



### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	51
B. Gambaran Umum UPT Perparkiran Kota Bandar Lampung .....	55
C. Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir .....	65

### **BAB IV ANALISIS**

A. Implementasi Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2011 ...	72
B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2011 .....	73

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Rekomendasi.....	79

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebelum memasuki pokok pembahasan, penulis menganggap perlu menegaskan beberapa pengertian yang terdapat dalam judul “**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Bandar Lampung)**” Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami pengertian judul yang dimaksud maka perlu dijelaskan makna judul tersebut.

1. **Tinjauan** adalah pemeriksaan yang diteliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan<sup>1</sup>.
2. **Fiqh Siyasah** secara terminologis, menurut ulama-ulama syara' (hukum islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi

---

<sup>1</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.32



menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dari ijtihad. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.

Secara terminologis dalam lisan al-arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah<sup>2</sup>.

3. **Implementasi** adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat atau disusun sebelumnya, dalam hal ini bisa diartikan jika implementasi dilaksanakan setelah perencanaan yang matang sudah dibuat secara tetap dan tidak ada perubahan didalamnya<sup>3</sup>.

4. **Peraturan Walikota Pasal 6 83 Tahun 2011** peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh walikota untuk mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan roda dua, roda empat dan garasi

---

<sup>2</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h.24

<sup>3</sup>Stiawan Ebta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016)

kendaraan bermotor memungut bayaran. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir.<sup>4</sup>

Pemungutan Pajak Parkir di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. Retribusi Parkir merupakan jenis pajak daerah yang baru, yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pengenaan Retribusi Parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang retribusi parkir yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Retribusi Parkir di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan<sup>5</sup>.

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan skripsi ini untuk membahas mengenai penerapan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2011

---

<sup>4</sup> Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 83 Tahun 2011

<sup>5</sup> Marihot Pahala Siahan, *Hukum Pajak Material: Objek, Subjek, Dasar pengenaan pajak, Tarif Pajak, dan Cara penghitungan pajak*, (Yogyakarta: Graha ilmu, Cet 1, 2010), h.13



Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Bandar Lampung)

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan yang mendorong penulis dalam memilih judul “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Bandar Lampung)” adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Obyektif**

- a. Dalam Peraturan Walikota Pasal 6 Nomor 83 Tahun 2011 sebagaimana yang berbunyi “tarif parkir kendaraan roda dua sebesar Rp 1500 pada satu jam pertama, setelah satu jam pertama dikenakan retribusi Rp 1000 per jamnya sedangkan untuk tarif parkir kendaraan roda empat sebesar Rp 2500 pada satu jam pertama, setelah lewat dari satu jam pertama dikenakan retribusi Rp 1500 perjamnya” dari Peraturan Walikota tersebut penulis ingin melihat Implementasi sesuai dengan berjalannya Peraturan Walikota yang berlaku.
- b. Dengan keluarnya Peraturan Walikota Pasal 6 Nomor 83 Tahun 2011 tentang tarif parkir, maka mempunyai acuan dan payung hukum yang jelas. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan Peraturan Walikota tersebut dilapangan.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Tersedianya literatur-literatur yang memadai untuk dapat membahas dan menulis skripsi ini dengan baik dan relevan dengan disiplin keilmuan yang penulis tekuni di Fakultas Syariah jurusan Siyasah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Tersedianya berbagai literatur yang memadai sehingga berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

## C. Latar Belakang Masalah

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Penyelenggaraan jasa parkir untuk umum dapat dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggaraan parkir yang dilakukan oleh pemerintah dapat memungut biaya sesuai Peraturan Walikota yang berlaku. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang disamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

---

<sup>6</sup>Mardiasno, Perpajakan, Edisi revisi Tahun 2011, Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2011) h. 21

Nomor 14 tahun 2000 pajak daerah<sup>7</sup> dimasukkan sebagaimana dibawah ini:

a. Pajak Provinsi, yang terdiri dari:

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dari permukaan

b. Pajak Kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- 7) Pajak parkir

Sebagaimana parkir masuk kedalam retribusi daerah pajak kabupaten/kota di dalam peraturan Undang-Undangan nomor 14 tahun 2000 untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang pajak parkir yang akan menjadi landasan hukum operasional

---

<sup>7</sup>Ibid.,h.2

dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Parkir didaerah kabupaten atau kota.

Peraturan Walikota mengenai tarif parkir kendaraan diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Pasal 6 Nomor 83 Tahun 2011 sebagaimana yang berbunyi “tarif parkir kendaraan roda dua sebesar Rp 1500 pada satu jam pertama, setelah satu jam pertama dikenakan retribusi Rp 1000 per jamnya sedangkan untuk tarif parkir kendaraan roda empat sebesar Rp 2500 pada satu jam pertama, setelah lewat dari satu jam pertama dikenakan retribusi Rp 1500 perjamnya”

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2011, fenomena yang muncul adalah kecenderungan daerah yang ingin mengatur segala hal berdasarkan pandangan bahwa semua objek dan subjek yang berada di wilayah yang menjadi kewenangan daerah yang diatur dalam peraturan walikota. Otonomi juga diartikan bahwa daerah harus mampu mandiri, dan untuk itu perlu memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) yang setinggi-tingginya yang dijabarkan dalam bentuk penerbitan berbagai perda pajak dan retribusi<sup>8</sup>.

Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi akan menjadi dasar berpijak dari kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pemungutan pajak maupun retribusi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan adanya pemberlakuan peraturan daerah yang sudah mendapat persetujuan dari DPRD, ditanda

---

<sup>8</sup>Ibid.Implikasi hukum atas sumber pembiayaan daerah dalam rangka kerangka otonomidaerah, cet 1, sinar grafika (Jakarta: 2009)\_h.58



tangani oleh Kepala Daerah serta diundangkan dalam peraturan daerah. Namun demikian, pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan peraturan daerah kepada pemerintah pusat, dalam hal ini menteri keuangan dan menteri dalam negeri setelah 15 hari ditetapkan dimana kewajiban tersebut berkaitan dengan kewenangan pusat untuk melakukan pengawasan yang sudah harus ditetapkan dalam tempo satu bulan sejak diterimanya peraturan daerah tersebut. Tindak lanjut, atas pengawasan tersebut adalah keputusan untuk membatalkan suatu peraturan daerah atau retribusi, apabila berdasarkan hasil kajian dinyatakan bertentangan dengan peraturan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hukum pajak merupakan aturan dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, dengan kata lain hukum dan material merupakan isi atau materi dari setiap peraturan dan atau ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia. Pelaksanaan hukum pajak formal merupakan bentuk pertanggung jawaban dari wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya di Indonesia yang disebut hukum pajak material.

Pajak yang dipungut di Indonesia dapat dibagi kedalam beberapa kelompok bagian, tarif parkir kendaraan masuk kedalam kelompok yaitu pajak berdasarkan golongan yang merupakan jenis pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan perhitungan wajib pajak sendiri dan atau pemerintah dan dipungut secara teratur dan suatu saat dapat dibebankan kembali kepada wajib pajak lain dan wajib diselesaikan pada saat yang sudah

ditetapkan oleh peraturan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain.

Peraturan Walikota mengenai tarif parkir kendaraan diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Pasal 6 Nomor 83 Tahun 2011 sebagaimana yang berbunyi “tarif parkir kendaraan roda dua sebesar Rp 1500 pada satu jam pertama, setelah satu jam pertama dikenakan retribusi Rp 1000 per jamnya sedangkan untuk tarif parkir kendaraan roda empat sebesar Rp 2500 pada satu jam pertama, setelah lewat dari satu jam pertama dikenakan retribusi Rp 1500 perjamnya”

Jika ditinjau dari ilmu fiqh siyasah tarif parkir termasuk dalam siyasah dusturiyah, siyasah dusturiyah yang kajian dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, siyasah dusturiyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena ini menyangkut tentang perundang-undangan negara. Dalam siyasah dusturiyah membahas konsep-konsep konstitusi yakni undang-undang dalam negara hingga lahirnya undang-undang. Parkir sebenarnya merupakan suatu prasarana yang terkait dengan banyak pihak yang didalamnya terdapat suatu akad (perjanjian). Seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya hal ini berdasarkan firman Allah surah Ali-imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: *(bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*<sup>9</sup>

Sangatlah jelas hukum Islamnya bagi orang yang menyalahi aturan dalam tindakan pengambilan pajak secara batil itu diharamkan oleh Islam. Dalam perspektif hukum Islam tujuan pembangunan hukum ialah meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia baik secara spiritual (keagamaan) maupun secara materiil. Prinsip-prinsip hukum Islam dalam segala bidang kehidupan sangat relevan dengan era pembangunan nasional, karena itu harus diperhatikan. Pengaturan bidang ekonomi dan keuangan harus didasarkan pada nilai-nilai etik dan moral, baik nilai-nilai Islami maupun Pancasila. Untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan didalam Al-Qur'an dirumuskan dengan kata-kata "*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*" yaitu negara yang sejahtera dibawah ridha Allah, negara berkewajiban mengatur dan mengalokasikan dana dalam jumlah yg cukup<sup>10</sup>.

Dari apa yang diuraikan di atas oleh penulis maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian adalah penerapan Peraturan Walikota Pasal 6 Nomor 83 Tahun 2011 mengenai penerapan tarif parkir kendaraan roda dua maupun roda empat sehingga penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini.

---

<sup>9</sup>Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2010), Surat Ali-Imran 76 h.59

<sup>10</sup>Adi Fahrudin, *Pengantar kesejahteraan Sosial*, (Bandung: refika Aditama, 2012) h.8

#### **D. Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti memfokuskan untuk meneliti penerapan Peraturan Walikota mengenai tarif parkir di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Bandar Lampung.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan meneliti dan menganalisis masalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Pasal 6 Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Tarif Parkir Kendaraan di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Tarif Parkir Kendaraan Dalam Peraturan Walikota Pasal 6 Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Tarif Parkir Kendaraan di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Bandar Lampung ?

#### **F. Tujuan penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk Mengetahui Implementasi Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2011 di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Bandar Lampung.



- b. Untuk Menjelaskan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Tarif Parkir Kendaraan Dalam Pasal 6 Peraturan Walikota 83 tahun 2011.

### **G. Signifikasi Penelitian**

Signifikasi yang akan didapat dalam penulisan ini dalam bidang akademik penelitian diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan bagi pembaca khususnya yang terkait dalam pembahasan yang ada dalam skripsi ini.

Bagi masyarakat luas penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Peraturan Walikota yang terkait mengenai parkir. Bagi Pemerintah penelitian ini dapat sebagai acuan untuk melihat kembali Peraturan Walikota yang sudah ditetapkan sudah dijalankan dengan baik atau belum.

### **H. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh pemecahan terhadap masalah<sup>11</sup>. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

#### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah dilakukan untuk kancan

---

<sup>11</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 1994), h.2

kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan<sup>12</sup> yang berkaitan dengan tarif retribusikendaraan roda dua dan roda empat dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 83 tahun 2011.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis. Deskriptif-Analitis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada didalam fenomena tertentu<sup>13</sup> yang berkaitan dengan tarif parkir kendaraan roda dua dan roda empat Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 83 tahun 2011.

## 2. Data dan Sumber Data

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, diperlukan adanya data yang tersedia dari:

#### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian yaitu peneliti terjun langsung

---

<sup>12</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 33

<sup>13</sup>Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985). H. 29

kelengkapan guna melakukan observasi<sup>14</sup>. Dalam hal ini data primer diperoleh dari Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung dengan melakukan interview kepada Kepala Bidang Parkir di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bahannya didapat dari penelitian kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau literature buku-buku, jurnal, skripsi, dan media yang terkait dengan masalah penelitian<sup>15</sup>.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi (sasaran) penelitian

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang diteliti<sup>16</sup>. Yang dimaksud populasi disini adalah anggota-anggota yang berkaitan dengan parkir di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Bandar Lampung. Populasi dalam Peraturan Walikota ini adalah pengguna jasa parkir di Jalan Jendral Suprpto perhari. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana suatu teknik sampling non random sampling yang mengharuskan peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

---

<sup>14</sup>Ibid. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, h. 28

<sup>15</sup>Amirudin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.30

<sup>16</sup>Sutrisno hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 207

#### b. Sampel dan teknik sampling

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Penelitian sampel mengenai tarif parkir di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Bandar Lampung dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*<sup>17</sup>. Purposive adalah metode pengambilan sampel dengan mengambil responden tertentu yang menjadi sampel penelitian yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan dipenelitian ini antara lain: Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung (1 orang), Petugas Parkir Resmi Lapangan (1 orang), Petugas Parkir bayangan atau tidak resmi (2 orang), Pengguna Jasa Parkir (5 orang). Maka Sampel dalam penelitian yang dilakukan berjumlah 9 orang.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data<sup>18</sup>. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Metode Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis. Dengan demikian Observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat

---

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 202

<sup>18</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.137



secara langsung kondisi dilapangan. Serta mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti dikantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden<sup>19</sup> dengan cara Tanya jawab secara lisan maupun tulisan dan bertatap muka secara langsung melalui pesawat telepon dengan narasumber dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dalam penelitian ini kepada Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tulisan atau film, dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik.<sup>20</sup> Dokumentasi merupakan salah satu memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan dalam penelitian, hasil rekaman oleh narasumber.

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut :

---

<sup>19</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 192

<sup>20</sup>Lexi J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Rosdakarya, 2010), h.216

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang dikumpulkan tidak logis, kemudian memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*cording*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data yang baik bersumber dari Al-qur'an, hadist, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Sistematika data (*systemizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

#### 6. Analisis data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang umum kongkrit itu ditarik kegeneralisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus<sup>21</sup>.

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif

---

<sup>21</sup>Ibid. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Rosdakarya, 2010), h. 205

adalah penelian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati<sup>22</sup>.

Penelitian ini menganalisa data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mengenai penerapan tarif parkir kendaraan roda dua dan roda empat sehingga dapat digeneralisasiakan menjadi suatu kesimpulan umum yang sesuai pengamatan peneliti lapangan.



---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 112.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Fiqh Siyasah

##### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Fiqh adalah semua kumpulan ijtihad para ulama tentang hukum syara'. Secara bahasa fiqh adalah "paham yang mendalam". Imam Turmudzi seperti dikutip Amir Syarifuddin menyebutkan "fiqh tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya. Kata *faqaha* diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak dua puluh kali, yang ke 19 (sembilan belas) kali yang berarti "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya."<sup>23</sup>

Secara terminologis al-Jurjani mendefinisikan bahwa fiqh mengetahui hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad serta memerlukan pemikiran dan perenungan, oleh karena itu Allah tidak dapat disebut "*Faqih*" karena bagi-Nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas."<sup>24</sup>

Menurut istilah fiqh "Ilmu atau Pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci. Dari definisi ini dapat kita pahami bahwa fiqh adalah upaya

---

<sup>23</sup>Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, *Konstektualisasi doktrin politik islam*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001), h.2-3

<sup>24</sup>Sahid, HM. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Idea, 2016), h. 9



sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara'i sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga hukum Islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara'i tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.<sup>25</sup>

*Fiqh* membicarakan aspek yang berhubungan antara sesama manusia secara luas (*mu'amalah*). Aspek *mu'amalah* ini dapat dibagi-bagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawarits* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik atau ketatanegaraan), dan *al-ahkam al-daulyah* hubungan internasional. Sementara dalam kajian ushul fiqh, fiqh dimaknai dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang sifatnya amaliah yang digali dari dalil-dalil yang lebih rinci. Pengertian ini menunjukkan bahwasanya fiqh adalah hasil dari suatu ijtihad yang dilakukan para ulama lewat kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum baik yang disebutkan secara langsung ataupun tidak langsung didalam Alqur'an an Sunnah.<sup>26</sup>

*Fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk beluk pengaturan kepeningan umat manusia pada

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Graub, 2003), h.2.

<sup>26</sup> Toha Andiko, Pemberdayaan Qow'aid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12, N0. 1, 2014 (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 105-106, (On-Line) tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/issue/view/32>

umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang berjalan pada syariat agama Islam.<sup>27</sup> Sehingga berguna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan, yang mungkin timbul dari kehidupan, bermasyarakat, bangsa dan negara yang dijalaninya.

Abdul Wahab Al-Khallaf mendefinisikan *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk menerima ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur keadaan.<sup>28</sup>

Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan *siyasah* sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.<sup>29</sup> Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.<sup>30</sup>

Adapun makna *as-siyasah* untuk penggunaan pada masa modern saat ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *daulah* (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.
- b. *As-siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta

---

<sup>27</sup>Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h.17

<sup>28</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), h. 4-5

<sup>29</sup>Ibid, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi doktrin politik islam*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001) h. 49

<sup>30</sup> Ma'luf, al-Munjid, (Beirut: Daar Al-Masyriq, 1986), h. 362

aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan interen negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interen tersebut misalnya undang-undang tentang partai politik pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada kekuasaan, berdasarkan ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang mudah dipahami dari dalil-dalilnya yang lebih terperinci.<sup>31</sup>

- c. Adapula istilah *as-siyasah as-syar'iyyah* termasuk dalam kategori istilah yang tidak digunakann untuk menunjukkan makna satu perkara. Oleh karena itu para ulama baik klasik maupun kontemporer, memberi definisi beragam mengenai *as-siyasah syar'iyyah* diantaranya: Ibnu Aqil al-Hambali<sup>32</sup> mengatakan “as-siyasah as-syar'iyyah adalah perbuatan-perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan, kendati keterangan tentangnya tidak disyariatkan oleh Rasulullah saw. dan tidak pula diturunkan melalui wahyu.

Sedangkan Ibnu Nujaim al-hanafi menyatakan hal yang tak jauh berbeda dengan pernyataan Ibnu Aqil al-Hambali bahwa *as-siyasah as-syar'iyyah* merupakan perbuatan yang dilakukan

---

<sup>31</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zhada, *Fiqh Siyasah dan Pemikiran Politik Islam* (Erlangga, 2008), h.2

<sup>32</sup>Beliau adalah Ali bin 'Aqil bin Muhammad Abu al-Wafa' Al-Zhihari, salah seorang tokoh terkenal satu-satunya di zamannya, alim, penukil dan cerdas. Menulis kitab yang sangat masyur, “Al-Furun” lebih dari 400 jilid. Sayangnya beliau menyelisihi manhaj salaf dan sejalan dengan manhaj mu'tazilah dalam banyak hal. Namun setelah itu beliau mengumumkan taubatnya dari manhaj Mu'tazilah serta buku yang membantah mereka. Dalam *Rapung Samsuddin*, 50.

bersumber dari seorang pemimpin untuk masalah yang ia pandang baik, kendati dalam perbuatannya itu tidak dapat padanya dalil syar'i yang sifatnya parsial. Nabi Muhammad SAW. Tida meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam setelah beliau wafar. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum Muslimin sendiri untuk menentukannya.<sup>33</sup>

Menurut Abdul Wahab al-khallaf, "ia adalah ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan urusan-urusan *daulah islamiyah* berupa undang-undang dan aturan yang sejalan dengan pokok dasar syari'at Islam, kendati dalam setiap perturan dan kebijakan tersebut tidak semua pada dalil khusus. Bahansi merumuskan bahwa *siyasah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'. Sementara para *fuqaha* mendefinisikan *siyasah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa atau pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dali yang khusus untuk itu.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 35

<sup>34</sup> Ibid, *Fqh Siyasah, Konstektual doktrin Politik Islam* (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001), h.4

Definisi yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh tersebut menghasilkan dua metode dalam pemberian definisi. Pertama, metode yang mengedepankan sisi akhlak dan sosial. Kedua, metode *fiqh syar'i* yang memberi petunjuk bagi para pemimpin dan *ulil amri* berupa kaidah-kaidah dan *hawabitnya*. Dan dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat ditemukan hakikat *siyasah syar'iyah* yaitu:

- a. *Siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupann manusia.
- b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulil al-amri*). Syaikh Mahmud Syaltut mengatakan: “Ulil amri ialah para ahli pikir yang banyak dikenal oleh masyarakat. Memiliki kesempurnaan dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan.Tidak hanya mencari kemaslahatan tapi peduli pada kemaslahatan tersebut.”<sup>35</sup>
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*ijab al- mashalih wa daf al-mafasid*)
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat islam yang bersifat universal. Dalam penetapan hukum Islam dikenal dengan istilah *siyasah syar'iyah*, yaitu suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan dan kepentingan

---

<sup>35</sup> Faris Abdul Khaliq, *Fikih politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), h.83.



umum. Tujuan yang hendak dicapai dalam penentuan hukum adalah kemaslahatan umat dalam rangka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.<sup>36</sup>

Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah dan implementasi dari *siyasah syar'iyah* dalam masyarakat harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dan dipemerintah (*al-musawwah*)
- c. Tidak memberatkan masyarakat dalam melaksanakannya (*'adam al-haraj*)
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqid al-adalah*)
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*ijab al-mashalih wa daff al-mafasid*).<sup>37</sup>

Islam sebagaimana dikenal, mulai dari madinah merupakan negara yang mempunyai lembaga hukum, yakni hukum yang dipakai dalam islam berdasarkan wahyu, dan kalau diperhatikan sejarah turunnya wahyu, akan kelihatan bahwa ayat-ayat mengandung soal-soal hidup kemasyaraatan memenag diturunkan di Madinah. Ayat-ayat

---

<sup>36</sup>H. Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017), H. 80

<sup>37</sup>Ibid, h.7

yang mengandung dasar hukum baik ibadah dalam kehidupan manusia disebut dengan ayat *ahkam*.<sup>38</sup>

Prinsip persamaan hak keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan fiqh siyasah, keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (basyariyah insaniyah) Nilai dasar keadilan di dalam sumber-sumber Islam banyak sekali, sebagaimana firman Allah Q.S An-nisa (4) 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (Q.S An-Nisa ayat 58)<sup>39</sup>

Fiqh siyasah dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (Politik Islam) Agama Islam tidak terlepas dari urusan politik karena tugas negara menegakkan agama yang menjadi pengiring dalam jalannya urusan negara.

<sup>38</sup>Moch Fachrurroji, “Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah, Imarah”, dalam *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 4 No.12 Juli – Desember 2008, h.298. Yang mengutip dari ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 57

<sup>39</sup>Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur’an Terjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2010), Surat An-Nisa 58 h.87

## 2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

Pada penjelasan dari *Fiqh Siyasah* sudah bisa memberikan arahan yang cukup jelas terhadap sumber-sumber *Fiqh Siyasah*, yang mana *fiqh siyasa* bersumber dari nash-nash Al-Quran dan juga Hadits, yang memberikan acuan dalam berlandaskan hukum Islam.

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai Kalam Allah Swt. yang sudah diturunkan dengan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah Saw. dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.<sup>40</sup> Allah Swt. berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah

---

<sup>40</sup> H.Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 15

*dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa [4] : 59).*<sup>41</sup>

Seruan pada taatlah kepada Allah dan amalkan Kitab-Nya, kemudian setelahnya taatlah kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi setiap manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Sunnatu'l-Lah telah menetapkan, bahwasahnya di antara manusia ada para Rasul yang akan menyampaikan syari'at Allah kepada manusia sehingga kita wajib untuk menaati mereka.<sup>42</sup>

Kemudian taatlah kepada ulil amri, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan juga seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Jikalau mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus bisa dipercaya sertatidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, dan didalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.

Jika ada suatu perkara yang diperselisihkan maka kembalikanlah pada Al-Qur'an dan juga Hadis, namun jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan juga hari akhir, sebab orang mu'min tidak akan mengutamakan sesuatu pun atas hukum Allah, sebagaimana dia lebih

---

<sup>41</sup>Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 87

<sup>42</sup>Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi Juz V*, Penerjemah : Bahrin Abu Bakar, Hery Noer Aly, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), h. 119

memperhatikan hari akhir daripada memperhatikan bagian-bagian duniawi. Disini pun terdapat banyak isyarat bahwa orang yang lebih mengutamakan hawa nafsu juga keuntungan-keuntungan lain daripada mengikuti Al-Quran dan Hadis, maka bukan termasuk dari bagian orang mu'min yang sebenarnya. Pengembalian sesuatu kepada Allah juga Rasul-Nya itu lebih baik bagi kalian, sebab hal itu memang merupakan asas yang lebih kokoh.<sup>43</sup>

Dalam *fiqh Siyasah*, *Amar ma'ruf nahi mungkar* serta kontrol sosial yang berlandaskan agama sangat diperlukan supaya bisa mencegah yang salah serta dapat memilih yang benar serta membuang yang salah bila disadari atau tidak.<sup>44</sup>

#### b. Al-Sunnah

Selain Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum dalam *fiqh siyasah* ada pula sunnah yang digunakan dalam dasar hukum kedua. Sunnah menurut istilah ialah: Hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau ketetapan.<sup>45</sup>

Adapun dasarnya, dinyatakan oleh Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَ هُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 121.

<sup>44</sup> Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*..., h. 15.

<sup>45</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Penerjemah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoor, (Jakarta: Rajawali, 1993), H. 47.



Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahuanhu, ia berkata. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihiwasallam: ‘Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu Kitabullah dan Sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di Telaga (di Surga).” (HR. al-Baihaqy).<sup>46</sup>

### 3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ruang lingkup *Fiqh siyasah* menurut Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam al-Sultaniyat* ada 5 (lima) macam:<sup>47</sup>

- a. *Siyasah dusturiyah* (siyasah perundang-undangan)
- b. *Siyasah maliyah* (siyasah keuangan)
- c. *Siyasah qadhiyah* (siyasah peradilan)
- d. *Siyasah harbiyah* ( siyasah peperangan)
- e. *Siyasah idariyah* (siyasah administrasi)

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy membagi bidang *fiqh siyasah* menjadi 8 (delapan):

- a. *Siyasah dusturiyah syar’iyah* (Politik Pembuatan Undang-Undang)
- b. *Siyasah tasyri’iyah syar’iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah qodhoiyah syar’iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah maliyah syar’iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah idariyah syar’iyah* (Politik Administrasi Negara)

<sup>46</sup>HR. Al-Hakim (1/93) dan al-Baihaqi (X/114) dari Abu Hurairah. Dan Malik dalam al-Muwathta’ pada bab an-Nahyu ‘anil Qaul bil Qadar (H. 686). Ini adalah lafadz al-Hakim, sanad hadits ini hasan dalam Buku Yazid bin Abdul Qodir Jawas, *Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah*, (Pustaka Imam Syafi’i:2006),hal.404

<sup>47</sup>Suyuthi Pulungan, M.A Pof. J. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan pemikiran* (Yogyakarta, Ombak 2014, h.43

- f. *Siyasah Khorijiyah syar'iyah/ siyasah dauliyah* (Politik Hubungan internasional)
- g. *Siyasah tantiedziyah syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Peundang-Undangan)
- h. *Siyasah harbiyah syar'iyah* (Politik Peperangan).<sup>48</sup>

Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit menjadi empat bidang saja:

- a. *Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks yang meliputi bidang sebagai berikut:
  - 1) Persoalan imama, hak dan kewajibannya
  - 2) Persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya
  - 3) Persoalan *ba'at*
  - 4) Persoalan *waliyatul ahdi*
  - 5) Persoalan perwakilan
  - 6) Persoalan *ahlul halli wal aqli*
  - 7) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.<sup>49</sup>
- b. *Fiqh siyasah dauliyah*, hubungan internasional dalam islam didasarkan pada sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif yang tertulis berasal dari Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw. dari kedua sumber ini kemudian ulama

---

<sup>48</sup>Ibid, h.43

<sup>49</sup>Djazuli, Prof. H. A. *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group 2009), h.32

menuangkannya kedalam *kajian fiqh al-siyar wa al-ijtihad* (hukum internasional tentang perang dan damai).<sup>50</sup> Dan ruang lingkup pembahasannya meliputi :

- 1) Persoalan internasional
- 2) *Territorial*
- 3) *Nasionalitas* dalam *fiqh* Islam
- 4) Pembagian dunia menurut *fiqh* Islam
- 5) Masalah penyerahan penjahat
- 6) Masalah pengasingan dan pengusiran
- 7) Perwakilan asing, tamu-tamu, orang-orang *dzimmi*
- 8) Hubungan muslim dengan non muslim dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana *hudud* dan dalam idana *qishash*.<sup>51</sup>

c. *Fiqh siyasah maaliyah*, kebijakan politik keuangan negara dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafa al-Rasyidin*, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah.

- 1) Sumber-sumber perbendaharaan negara
- 2) Sumber pengeluaran dan belanja negara
- 3) Baitul maal dan fungsinya.<sup>52</sup>

d. *Fiqh siyasah harbiyah*

---

<sup>50</sup>Muhammad Iqbal, h. 251

<sup>51</sup>Ibid, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. (Yogyakarta:Ombak, 2014), h.44

<sup>52</sup>Ibid, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. (Yogyakarta:Ombak), 2014. h.44

- 1) Kaidah-kaidah peperangan dalam Islam
- 2) Masalah mobilisasi umum dan hak-hakjaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan
- 3) Tawaran perang, *ghanimah*, serta peperangan
- 4) Mengakhiri peperangan menuju perdamaian.

Rasulullah berada dalam alam kesatuan, berusaha membuat dasar pembentukan masyarakat dan menimbulkan daya gerak yang mempengaruhi kehidupan politik. Ibnu khaldun sebagaimana yang dikutip dari M. Tahir, menemukan satu tipologi Negara dengan tolak ukur kekuasaan yaitu<sup>53</sup>:

- a. Negara dengan ciri kekuasaan alamiyah (*al-mulk at-taba'i*), yakni negara ini ditandai dengan kekuasaan yang sewenang-wenang (*dipostisme*) yang cenderung epada hukum rimba. Dalam negara keunggulan dan kekuatan sangat berperan kecuali itu prinsip keadilan diabaikan.
- b. Negara dengan ciri kekuasaan politik (*al-mulk as-siyasi*), yakni:
  - 1) Negara hukum atau nomokrasi Islam (*as-siyasah ad-diniyyah*)  
 karakteristik negara ini ialah kecuali Al-Qur'an dan Sunnah, akal manusia sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan Negara

---

<sup>53</sup>Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi hukum islamnya, implementasinya pada periode Madinah dan Masa Kini* (Bogor, Kencana, 2003), cet ke 1, h, 13

- 2) Negara hukum sekuler (*as-siyasah al-'aqliyyah*) negara ini mendasarkan hukum pada hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu.
- 3) Negara ala republik plato (*as-siyasah al-madaniyyah*) merupakan suatu negara yang diperintah oleh segelintir golongan elit atas sebagian budak yang tidak mempunyai hak pilih.

#### 4. Tujuan *Fiqh Siyasah*

Secara etimologi *fiqh* merupakan bentuk masdhar dari tashifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan, ucapan serta tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi *fiqh* lebih populer sebagai ilmu yang berlandaskan dengan hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>54</sup>

Pada penelitian ini kajian *fiqh siyasah* yang digunakan adalah *dusturiyah*. *Fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakat ini. *Fiqh siyasah dusturiyah* membahas pengaturan dan perundangan-undangan yang dituntun oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dan prinsip-prinsip beragama yang merupakan realisasi dalam kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

---

<sup>54</sup> Ibnu Syarif, Muzar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta Erlangga, 2008), h.31



Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang luas dan kompleks, secara umum meliputi:

- a. Persoalan ruang lingkup (pembahasan)
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajiban
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul ali wal aqli*
- h. Persoalan *wazarah* dan perbandingannya.<sup>55</sup>

Keseluruhan persolan tersebut, fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari hal pokok:

- a. Dalil kuliyy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, Mudasidu syariah, dan mandat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat karena dalil-dalil kuliyy menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat.
- b. Aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi, termasuk didalam hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>56</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan fiqh siyasah dusturiyah adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga

---

<sup>55</sup>Hasan Ibrahim, Sejarah Kebudayaan Islam, (Jakarta, Kalam Mulia, 2003) cet 1, h.276

<sup>56</sup>Djazuli, Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu-rambu Syariah, (Jakarta Kencana, 2003), h-47-48

Negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu Negara. Didalamnya mencakup pengangkatan imam, syarat *ahlul ali wal aqli*, syarat imam pemberhentian imam, persoalan bai'ah, persoalan hujaroh (kementerian).

## **B. Konsep Retribusi**

### **1. Pengertian Retribusi**

Retribusi sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber perbiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pengertian Pengertian Retribusi Daerah menurut Masdiasmo adalah pungutan daerah sebagai jasa atas pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum.<sup>57</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000<sup>58</sup>, retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum.

Retribusi menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009<sup>59</sup> adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

---

<sup>57</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi revisi Tahun 2011*, (Yogyakarta : CV ANDI OFFSET, 2011), h.15

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan umum.

Retribusi Daerah menurut Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001<sup>60</sup> adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan pemerintah.

Retribusi Daerah menurut Marihot.P.Siahaan adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau pemerintahan.<sup>61</sup> Jadi dari pengertian beberapa Retribusi Daerah dapat diambil kesimpulan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat atau badan. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang dapat dijadikan objek retribusi.<sup>62</sup>

#### a. Objek Retribusi Daerah

---

<sup>60</sup>PP No.66 Tahun 2001, Tentang Retribusi Daerah

<sup>61</sup>Marihot. P. Siahaan . Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . (Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2005), h.6

<sup>62</sup>Aries Djanuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-Element Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, (Bogor :GhaliaIndonesia, 2012), h. 95

Objek Retribusi Daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut<sup>63</sup> :

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2) Retribusi Jasa Khusus

Retribusi Jasa Khusus adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atau kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud dengan pembinaan, pengaturan pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

---

<sup>63</sup>Ahmad yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*(Jakarta : rajawali Pers, 2013), h. 64-71

## 2. Jenis Retribusi

Menurut Mardiasmo jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu<sup>64</sup> :

### a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kepentingan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Jasa tersebut memiliki manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- 4) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi.
- 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- 6) Retribusi dapat dipanggil secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial.
- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Berikut adalah beberapa jenis-jenis Retribusi Jasa Umum yaitu:

---

<sup>64</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*, (Yogyakarta : CV ANDI OFFSET , 2011), h. 16



- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan.
- 3) Retribusi penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
- 4) Retribusi pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- 5) Retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum.
- 6) Retribusi pelayanan pasar.
- 7) Retribusi pengjian kendaraan bermotor.
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- 9) Retribusi pengganti biaya cetak peta.
- 10) Retribusi pengjian kapal perikanan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Berikut adalah beberapa jenis retribusi jasa usaha adalah:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.

- 2) Retribusi pasar grosir atau pertokoan.
- 3) Retribusi tempat pelelangan.
- 4) Retribusi terminal.
- 5) Retribusi tempat khusus parkir.
- 6) Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa.
- 7) Retribusi penyedotan kakus.
- 8) Retribusi rumah potong hewan.
- 9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
- 10) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- 11) Retribusi penyebrangan diatas air.
- 12) Retribusi pengolahan limbah cair.
- 13) Retribusi penjualan produksi daerah.

c. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizina tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut merukan biaya yang menanggulangi dampak negatif

dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Berikut ini adalah beberapa jenis retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi antara lain:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi tempat penjualan minuman berakohol
- 3) Retribusi izin gangguan
- 4) Retribusi izin trayek

### **3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Parkir**

Menurut Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2011 Pasal 5<sup>65</sup> bahwa tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum diukur berdasarkan zona parkir, jenis kendaraan, dan frekuensi atau waktu pemakaian tempat parkir ditepi jalan umum.

### **4. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2011 pasal 6 ayat 1,2,3,4,5 yaitu:

Ayat 1 Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan parkir diepi jalan umum ditetapkan berdasarkan zonasi, lama parkir, dan atau durasi berlangganan.

Ayat 2 Prosedur pembayaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam dua pilihan yaitu dengan

---

<sup>65</sup>Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2011 Pasal 5, *Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum*

membayar berdasarkan tarif progresif atau membayar secara berlangganan.

Ayat 3 Pilihan atas dasar prosedur pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan secara mutlak kepada wajib retribusi untuk dipilih.

Ayat 4 Dalam rangka penerimaan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kota dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dengan memperhatikan prinsip dasar retribusi.

Ayat 5 Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Retribusi Parkir Pada Zona I

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)	Tarif Tambahan Per Jam (Rp)
1.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick up, dan sejenisnya	Untuk 0-1 2500,-/1jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 1500 / juam
2	Kendaraan angkatan Barang dan Jenis Box	Untuk 0-1 3500,-/1jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 2000 / jam

3	Bus, Truk dan Sejenisnya	Untuk 0-1 4500,-/1jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 2500 / jam
4	Truk Gandeng, Trailer Kontainer dan Alat besar Lainnya	Untuk 0-1 5500,-/1jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 3000 / jam
5	Sepeda Motor	Untuk 0-1 1500,-/1jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 1000 / jam

**Sumber:** Database Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung

b. Retribusi Parkir Pada Zona II

<b>No</b>	<b>Jenis Kendaraan Bermotor</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Tarif Tambahan Per Jam (Rp)</b>
1.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick up, dan sejenisnya	Untuk 0-1 2000,-/1jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 1000 / juam
2	Kendaraan angkatan Barang dan Jenis Box	Untuk 0-1 3000,-/1jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 1500 / jam
3	Bus, Truk dan Sejenisnya	Untuk 0-1 4000,-/1jam	Untuk 1 jam selanjutnya

		pertama	dikenakan 2000 / jam
4	Truk Gandeng, Trailer Kontainer dan Alat besar Lainnya	Untuk 0-1 6000,-/1jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 3000 / jam
5	Sepeda Motor	Untuk 0-1 1000,-/1jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 500 / jam

**Sumber:** Database Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung

c. Retribusi Parkir Berlangganan

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif Perbulan
1	Sedan, Jeep, Minibus, Pickup, dan sejenisnya	Rp. 60.000,- /bulan
2	Kendaraan angkutan barang jenis boox	Rp. 90.000,- /bulan
3	Sepeda Motor roda 2	Rp. 30.000,- /bulan

**Sumber:** Database Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung



## **5. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluarsa**

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 Pasal 39<sup>66</sup> Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan yang artinya seluruh proses pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yakni dokumen lain yang dipersamakan bisa berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat

---

<sup>66</sup>Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 Pasal 39

dihapuskan. Penghapusan piutang retribusi daerah provinsi dan penghapusan piutang retribusi daerah kabupaten atau kota yang sudah kadaluarsa dilakukan dengan keputusan yang masing-masing ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati atau Walikota. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>67</sup>

### C. Konsep Implementasi

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Fungsi Pemerintah adalah menyelenggarakan negara berdasarkan kewenangannya. Peran pemerintah sangat menentukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada didalam masyarakat. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah sebagai penentu dari penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat akan terselesaikan dengan baik melalui kebijakan pemerintah. Perencanaan, penyusunan sampai penetapan kebijakan akan sangat menentukan efektifitas kebijakan itu sendiri. Kebijakan harus mempunyai output yang signifikan dalam penyelesaian masalah yang terjadi.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah imlementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for craying out* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu)

---

<sup>67</sup>Ibid. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*, (Yogyakarta : CV ANDI OFFSET , 2011), h. 18

dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).<sup>68</sup>

Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak terhadap akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah.

Pengertian Implementasi menurut Mazmanian dan sebaster merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga bentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting, atau seperti keputusan badan pengadilan. Sementara itu menurut Grindle mengatakan bahwa implementasi secara umum adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Sedangkan pengertian Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok atau pejabat-pejabat yang ada dalam pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pada pemerintah yang membawa dampak pada negara.<sup>69</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengelolaan memiliki arti proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu

---

<sup>68</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>69</sup>Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*, (Yogyakarta : 2012)

merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi dan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan.<sup>70</sup>

Pengelolaan menurut Marry Parker Follet mengemukakan bahwa pengelolaan proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan dalam menyelesaikan sesuatu, terdapat tiga faktor pendukung yaitu:

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia dan faktor-faktor produksi lainnya.
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.<sup>71</sup>

Jadi dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan serangkaian tindakan yang berjenjang, dan berlanjut, dan berkaitan dalam pengelolaan retribusi parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan manfaat dalam bermasyarakat.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Daryanti, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), h.348

<sup>71</sup> Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *pengantar manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2009), h.6

<sup>72</sup> George R Terry, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007) h.23

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Masalah mengenai Retribusi parkir bukanlah hal yang baru, adapun beberapa penelitian yang mengangkat tentang Retribusi parkir di tepi jalan umum karena masih menjadi bahasan yang cukup menarik untuk diteliti.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nesya Nadia Amelinda mahasiswa Universitas Islam Negeri Lampung dari jurusan Ekonomi Islam yang berjudul “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perspektif Ekonomi Islam” menyimpulkan bahwa pada penerapan fungsi pengarahan pengelolaan retribusi parkir yang dilakukan oleh UPT parkir telah berjalan baik. Dalam prinsip kemaslahatan untuk merealisasikan pendapatan hasil daerah sudah baik dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena hasil dari retribusi parkir tersebut digunakan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Riski Atika Sari mahasiswa Universitas Lampung dari jurusan Ilmu Pemerintahan yang berjudul “Strategi Dinas Perhubungan dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Metro” menyimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Metro tidak memiliki strategi khusus dalam penanggulangan parkir liar di Kota Metro sehingga banyak masyarakat yang resah dengan ulah juru parkir liar di Kota Metro.

3. Penelitian yang dilakukan oleh feriyanto Mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dari jurusan Muamalah yang berjudul “Penarikan Retribusi Parkir dalam Perspektif normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam” menyimpulkan bahwa dalam kajian normatif praktik sewa menyewa lahan parkir tidak sah menurut syara’ karena akad ijarah yang digunakan dalam transaksi bertentangan dengan salah satu prinsip muamalah. Pemerintah seharusnya memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum melalui sosialisasi yang teratur baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga penarikan Retribusi Parkir menurut perspektif normatif, yuridis, sosiologis hukum Islam dapat berjalan seimbang.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menyusun dan mengkaji, memiliki spesifikasi tersendiri dibandingkan penelitian-penelitian lain. Karya ini bisa jadi merupakan bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah didalam penelitian ini secara khusus menggunakan Analisis *Fiqh Siyasah* yang dikaji lebih mendalam.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

\_\_\_\_\_, *Hukum dan politik Hukum*. Bandung: Citra Dity Bakti, 2014.

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Penerjemah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali, 1993

\_\_\_\_\_, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1977.

Adi Fahrudin, *Pengantar kesejahteraan Sosial*. Bandung: refika Aditama, 2012.

Adrian Sutedi, *Implikasi hukum atas sumber pembiayaan daerah dalam kerangka otonomi daerah*, cet I, sinar grafika. Jakarta: 2009.

Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi Juz V*, Penerjemah : Bahrin Abu Bakar, Hery Noer Aly, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986.

Ahmad yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta : rajawali Pers, 2013.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Graub, 2003.

Amirudin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Aries Djanuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-Element Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, (Bogor :GhaliaIndonesia, 2012.

Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015

Burhanuddin s., *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta : BPFE, 2009.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.

- Cholid Narbuko, Abu ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Daryanti, *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.
- Djazuli, Prof. H. A. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenada Media Group 2009.
- \_\_\_\_\_, *Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu-rambu Syariah*, Jakarta Kencana, 2003.
- Dokumen, *Badan Pusat Statistik (BPS)*, Kecamatan Tannjung Karang Pusat, 2011.
- Dokumen, *UPT Perparkiran*, Kota Bandar Lampung, 2011.
- Erni Trisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Management*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009.
- Faris Abdul Khaliq, *Fikih politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- George R Terry, *Managemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Hasan Ibrahim, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta, Kalam Mulia, 2003.
- H.Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- H. Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017.
- HR. Al-Hakim (1/93) dan al-Baihaqi (X/114) dari Abu Hurairah. Dan Malik dalam al-Muwathta' pada bab an-Nahyu 'anil Qaul bil Qadar (H. 686). Ini adalah lafadz al-Hakim, sanad hadits ini hasan dalam Buku Yazid bin Abdul Qodir Jawas, *Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah*, (Pustaka Imam Syafi'i, 2006.
- Ibnu Syarif, Mugar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta Erlangga, 2008,
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka cipta, 1994.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1986.

Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985

Lexi J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2010.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi revisi Tahun 2011, Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2011.

Marihot. P. Siahaan . *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* . Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2005.

Marihot Pahala Siahan, *Hukum Pajak Material: Objek, Subjek, Dasar pengenaan pajak, Tarif Pajak, dan Cara penghitungan pajak*. Yogyakarta: Graha ilmu, Cet 1, 2010.

Ma'luf, al-Munjid, Beirut: Daar Al-Masyriq, 1986.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian* , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Muhammad Iqbal , *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi doktrin politik islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zhada, *Fiqh Siyasah dan Pemikiran Politik Islam* . Erlangga, 2008

Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi hukum islamnya, implementasinya pada periode Madinah dan Masa Kini*, Bogor, Kencana, 2003.

Sahid, HM. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya, Pustaka Idea, 2016.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

StiawanEbta , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2016.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Al-fabeta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif kualitatif dan R&D*

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:

Rineka Cipta

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: 2012.

## **B. Jurnal**

Toha Andiko, Pemberdayaan Qow'aid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12, N0. 1, 2014 (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 105-106,(On-Line)tersedia di<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/issue/view/32>

Moch Fachrurroji, "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah, Imarah", dalam *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 4 No.12 Juli –Desember 2008, h.298. Yang mengutip dari ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994.

## **C. Al-Qur'an**

Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2010)

## **D. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009

PP No.66 Tahun 2001

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 Pasal 39

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2006

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 83 Tahun 2011

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2016

## **E. Wawancara**

Hasil wawancara dengan Bapak Afrully Rahmad, Tanggal 13 January 2020, Pukul 09.30-11.30 WIB

Hasil wawancara dengan Danang selaku petugas Dinas Perhubungan yang menjaga pos serta menarik retribusi parkir di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Pusat, Tanggal 06 Desember 2019, Pukul 13.00-13.30

Hasil wawancara dengan Bayu selaku petugas juru parkir di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Pusat, Tanggal 06 Desember 2019, Pukul 13.40-14.05 WIB

Hasil wawancara dengan Putra selaku petugas juru parkir di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Pusat, Tanggal 06 Desember 2019, Pukul 14.09-14.35 WIB

Hasil wawancara dengan Marwiyah selaku pengguna jasa parkir di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Pusat, Tanggal 06 Desember 2019, Pukul 11.00-11.25 WIB

Hasil wawancara dengan Vita selaku pengguna jasa parkir di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Pusat, Tanggal 06 Desember 2019, Pukul 11.25-11.40 WIB

Hasil wawancara dengan Lia selaku pengguna jasa parkir di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Pusat, Tanggal 06 Desember 2019, Pukul 11.45-12.15 WIB

Hasil wawancara dengan Adit selaku pengguna jasa parkir di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Pusat, Tanggal 06 Desember 2019, Pukul 12.19-12.34 WIB

Hasil wawancara dengan Adit selaku pengguna jasa parkir di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Pusat, Tanggal 06 Desember 2019, Pukul 12.38-12.55